

## Pengentasan Kemiskinan melalui *E-Government*

<sup>1</sup>Dini Arwati, <sup>2</sup>Dini Verdania Latif

<sup>12</sup>Universitas Widyatama Bandung

e-mail :<sup>1</sup>dini.arwati@widyatama.ac.id/ <sup>2</sup>dini.verdania@widyatama.ac.id

### Abstrak

Tingkat Kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan menjadi 9,41% pada periode Maret 2019 dari periode September 2018 sebesar 9,66%. Meskipun demikian tingkat kemiskinan di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam dan Thailand. Salah satu penyebab kemiskinan adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Praktik korupsi dilakukan penyelewengan terhadap anggaran terutama pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, juga dalam hal perijinan. Untuk mencegah hal tersebut, beberapa negara, sebagai contoh Korea Selatan, Kazaktan dan Cina telah mengimplementasikan *e-government*, yang dapat memberikan informasi kegiatan pemerintah secara transparan, sehingga publik dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran.

**Kata Kunci:** kemiskinan, korupsi, e government, transparansi

## *Poverty Alleviation through E Government*

### Abstract

*The poverty rate in Indonesia has decreased to 9.41% in the March 2019 period from the September 2018 period of 9.66%. Even so the poverty rate in Indonesia is still higher compared to Malaysia, Vietnam and Thailand. One of the causes of poverty is corruption committed by public officials. Corruption practices are deviated from the budget, especially in the procurement of goods and services, also in terms of licensing. To prevent this, some countries, for example South Korea, Kazaktan and China have implemented e government, which can provide information on government activities transparently, so that the public can participate in the process of drafting and controlling the budget.*

**Keywords:** *poverty, corruption, e government, transparency*

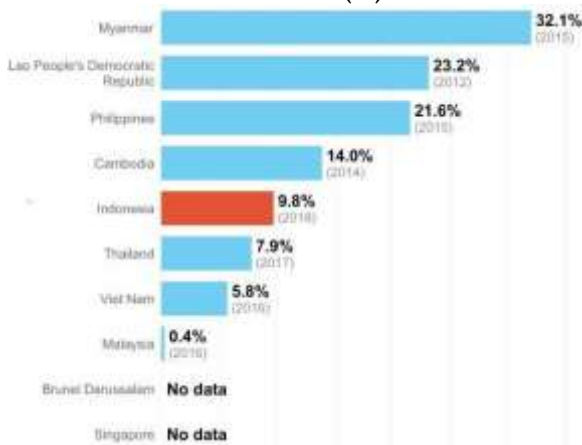
### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa sebanyak 12,72 juta orang dan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulu Kalimantan yaitu sebanyak 0,97 juta orang (Fauzia, 2019). Jika di bandingkan negara lainnya di tingkat ASEAN, tingkat kemiskinan di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam dan Thailand (Asian Development Bank, 2019). Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Untuk menurunkan angka kemiskinan, pada tahun 2019 sekarang ini , pemerintah menerapkan strategi dengan memperbesar alokasi anggaran untuk kesehatan rakyat di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Selain itu pemerintah berusaha mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial. Dengan adanya program ini diharapkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen (Pitoko, 2019).

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

**Tabel 1. Populasi penduduk di bawah garis kemiskinan (%)**



Sumber: Asian Development Bank, 2019

Tetapi mungkin strategi ini haruslah disertai dengan adanya pengawasan dalam hal penyusunan dan penggunaan anggaran karena menurut Transparansi Internasional Indonesia (TII), dalam prakteknya, uang rakyat yang dianggarkan dalam APBN dan APBD sekitar 30–40 persen di korupsi, dan 70 persennya terjadi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (KPK, 2019). Korupsi dapat mengurangi jumlah yang telah dialokasikan untuk program bantuan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam pengawasan penyusunan dan penggunaan anggaran untuk mencegah terjadinya korupsi, konsep yang perlu dipertimbangkan adalah konsep transparansi. Transparansi berarti adanya ketersediaan data dan informasi publik. Informasi yang ada tersebut harus mudah diakses lengkap dan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi juga memegang peranan penting dalam mengurangi korupsi dengan adanya partisipasi publik secara langsung untuk mengendalikan anggaran (Lee, 2017). Pemerintahan yang lebih transparan akan dapat membangun kepercayaan publik. Dalam negara demokrasi kepercayaan warga kepada pemerintah adalah sangat penting. Kepercayaan dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dengan menghubungkan warga negara, institusi dan politisi.

Penelitian yang dilakukan Park dan Blenkinsopp (2011) menunjukkan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi menciptakan iklim kepercayaan pada warga masyarakat karena

dapat menumbuhkan lingkungan keterbukaan yang memungkinkan warga negara untuk mengontrol lembaga dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan., misalnya, anggaran partisipatif, di mana wajib pajak dapat memutuskan cara sumber daya mereka digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Buehn, Dell'Anno dan Schneider (2017) berpendapat bahwa kurangnya transparansi berdampak pada hilangnya kepercayaan, yang pada gilirannya memicu ilusi fiskal. Ilusi fiskal dihubungkan dengan transparansi melalui teori agensi, yang menyatakan bahwa politisi (agen) mungkin tidak selalu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara (prinsipal), tetapi kadang-kadang dapat berusaha untuk mencapai target mereka sendiri, terlepas dari kebutuhan warga negara.

Untuk itu, Pemerintah harus mampu memberikan layanan yang terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah memanfaatkan teknologi informasi, yang lebih dikenal dengan istilah *e-government*. Melalui *e-government*, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas informasi kepada masyarakat, dengan memberikan informasi yang diperlukan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran pemerintah. E government juga dapat menyediakan sarana sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan warganya. Sehingga pengawasan warga bisa berlangsung secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e government di berbagai negara dan dampaknya terhadap penurunan tingkat korupsi sehingga dapat tercapainya pengentasan kemiskinan.

## B. PEMBAHASAN

1. *E-government* di Provinsi Chungcheongnam, Korea Selatan (berdasarkan survey United Nation, 2018)

Terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008, mengakibatkan belanja pemerintah untuk kesejahteraan social menjadi terhambat. Hal ini juga makin diperkuat dengan adanya krisis fiskal akibat adanya berbagai penyimpangan penggunaan oleh pejabat publik dan manajemen keuangan kepala daerah yang buruk. Pemerintah memerlukan integritas dan transparansi keuangan daerah. Untuk

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

mencegah penyelewengan oleh pejabat publik, pemerintah. Chungcheongnam-do berkesimpulan bahwa semua informasi fiskal harus tersedia untuk public. Untuk meningkatkan transparansi fiskal dan pemantauan fiskal dengan memperluas partisipasi penduduk, pengungkapan informasi dilakukan secara digital, melalui e government. Semua Informasi anggaran diantaranya adalah termasuk informasi pengeluaran secara realtime dan menunjukkan jumlah uang yang telah dibelanjakan. Informasi anggaran ini juga dilengkapi dengan berbagai keterangan, agar public dapat mengetahui kesesuaian antara anggaran dengan rencana jangka pendek, menengah dan berkelanjutan. Selain rencana pemerintah publik juga harus mengetahui indikator pembangunan. Publik juga diberikan akses untuk memberikan kritik dan saran melalui kotak saran secara langsung kepada orang yang bertanggung jawab mengenai anggaran.

Untuk pengeluaran, semua metode kontrak, isi kontrak, dan pihak mana saja yang ikut serta dalam kontrak diungkapkan, bahkan termasuk juga biaya makan. Hasilnya, warga bisa mengecek status eksekusi anggaran Chungcheongnam-do online secara real time. Pengawasan fiskal telah diperluas dan transparansi dan efisiensi pengeluaran fiskal telah dimaksimalkan, sehingga dapat mengurangi penyelewengan oleh pejabat pemerintah.

2. *E-government* di Kazaktan (berdasarkan penelitian dari Sheryazdanova dkk, 2016) *E-government* di kazaktan dibuat berdasarkan asumsi bahwa :

1. *E-government* menciptakan transparansi komunikasi secara elektronik.
2. *E-government* mengurangi pegawai pemerintah sebagai mediator antara warga negara dan pemerintah.
3. *E-government* mengurangi kebijakan yang diambil secara sepihak oleh para pejabat
4. *E-government* dapat menyebabkan pengurangan korupsi dengan menghindari hambatan administrasi

birokrasi

Di Kazaktan penggunaan *e-government* diutamakan untuk bidang yang paling banyak mengakibatkan terjadinya korupsi, yaitu bidang pengadaan publik, perijinan dan pengendalian oleh otoritas. *E-government* untuk pengadaan dapat diakses melalui situs web <http://goszakup.gov.kz>. Web ini telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2010. Dengan website ini, pengusaha dapat dengan mudah berpartisipasi dalam tender. Prosedur ini memastikan transparansi proses, menciptakan kondisi yang sama untuk setiap peserta tender, dan berkompetisi secara adil. Untuk kegiatan perijinan, dapat dilakukan melalui portal e lisensi yaitu <http://elicense.kz>, yang terdiri dari 16 kategori yang terdiri dari ratusan lisensi dan izin, termasuk bidang penting seperti transportasi, konstruksi, perawatan kesehatan, layanan hukum, dan perlindungan lingkungan. Registrasi elektronik dari bisnis individu diluncurkan pada tahun 2013, melalui Registrasi E- Bisnis. Sebelum adanya web ini, pemohon harus mengumpulkan 12 dokumen berbeda dan menunggu persetujuan selama 30 hari atau lebih. Melalui web ini, terdapat pengurangan jumlah dokumen yang diperlukan minimum dan hemat waktu, karena prosedur elektronik memakan waktu 15 menit.

*E-government* juga melayani layanan elektronik polisi lalu lintas. Websiter ini dibuat pada 2012 dan terbesar kota-kota Kazakhstan seperti Amati, Astana, Karaganda, Aktau, Pusat Layanan Elektronik Khusus didirikan untuk pendaftaran kendaraan penduduk dan mendapatkan surat izin mengemudi. Selain itu, pembayaran denda dapat menggunakan database elektronik melalui Internet, Hal ini akan mengurangi kecurangan karena adanya oknum yang melakukan pemerasan. Pusat pelayanan publik merupakan "jendela tunggal" dengan banyak layanan social yang dapat diakses. Sejak tahun 2011, Pusat layanan publik menjadi bagian dari e government, dengan penekanan pada pengurangan dokumen dan birokrasi yang secara signifikan menurunkan risiko korupsi hingga 80 persen

3. *E-government* di Cina

(berdasarkan penelitian Zhang, 2011)

Di Cina upaya pencegahan korupsi melalui *e-government* berdasarkan empat fungsi utama yang terintegrasi. Keempat fungsi utama itu di

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

mulai dari penyediaan informasi dasar, pemantauan, pengumpulan opini publik, menganalisis resiko dan membuat prediksi. Rinciannya adalah sebagai berikut :

## a. Platform e-publikasi

Platform e-publikasi berfungsi sebagai dasar sistem anti korupsi, yang tujuan dan fungsinya dirancang untuk mencegah korupsi. Dengan adanya informasi ini diharapkan informasi dapat lebih transparan, dengan cara meningkatkan interaksi antara pemerintah dengan publik. Publikasi elektronik dapat memotivasi warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan dengan menyediakan mekanisme pemantauan korupsi. E-publikasi menjamin hak warga negara untuk mengetahui, berpartisipasi dan mengawasi. Selain itu platform E-publikasi meminta pegawai negeri untuk mendisiplinkan diri untuk mencegah korupsi. Kesadaran pegawai negeri tentang antikorupsi meningkatkan keseluruhan tingkat kejujuran dan kebersihan pemerintah. Sistem ini berfokus pada aspek-aspek berikut: pengeluaran publik, properti dan kondisi keuangan pegawai negeri; penawaran dan investasi dan pengadaan pemerintah.

## b. Platform E-monitoring

Platform *E-monitoring* dapat di lihat dari dua sisi, yang mencakup pengertian secara tradisional melalui pemantauan risiko korupsi secara real time dan juga pengendalian dinamis melalui partisipasi warga melalui opini publik. Platform ini merupakan pusat distribusi informasi yang akurat dan ketepatan waktunya akan secara langsung menentukan hasil akhir dari pencegahan dan pengendalian korupsi. Sistem pengawasan terintegrasi mencakup bidang-bidang utama administratif, terutama pemeriksaan administrasi dan persetujuan operasi dana publik, anggaran keuangan dan efisiensi administrasi. Sistem E-monitoring juga terkait dengan E-partisipasi, yaitu keterlibatan, warga negara. E-partisipasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu adanya komunikasi timbal balik antara publik dan pemerintah juga pelaporan atau keluhan warga.

## c. Platform E-warning

Platform E-warning adalah bagian penting dalam kerja anti korupsi, yang berkontribusi

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi. Agar aktif dalam menganalisis situasi korupsi, sistem anti korupsi membutuhkan dukungan data yang kuat . Sebagai input dari sistem, data harus secara langsung dikumpulkan dan dapat dipercaya. Sumber data terutama berasal dari pengawasan secara online statistik bisnis mengenai kegiatan dan informasi umum yang berkaitan dengan publik . Metode pengawasan berkaitan dengan empat kegiatan yaitu pengumpulan informasi, analisis, umpan balik dan penanganan, dan tiga tingkat pra-peringatan . Dengan menganalisis data secara otomatis, sistem warning akan memberikan peringatan ketika kondisi abnormal muncul.

## d. Platform E-sharing

Dalam *e-government* informasi yang diperoleh dapat di bagi menjadi dua jenis, yaitu informasi yang di bagikan oleh badan pemerintah dengan hierarki vertikal yang sangat jelas dan informasi yang di bagikan oleh badan yang bersifat horizontal, yang mengacu pada departemen yang berbeda, perusahaan swasta dan LSM. Informasi yang di bagikan kepada publik harus meliputi keduanya baik informasi vertikal dan horizontal , agar dapat menghindari terjadinya kolusi antara pemerintah dengan badan badan lainnya.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

*E-Government* dapat menjadi alat sebagai pengentas kemiskinan meskipun secara tidak langsung. Kemiskinan dapat dikurangi dengan cara mencegah terjadinya korupsi. Korupsi yang sering dilakukan para pejabat publik dapat di tekan melalui penerapan *e-government*. Melalui *e-government* pemerintah dapat memberikan informasi secara transparan yang dapat memberikan dorongan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

*E-government* di Korea Selatan menekankan pada informasi anggaran penerimaan melalui fiskal dan pengeluaran yang berkaitan dengan belanja dan pengadaan barang dan jasa publik, karena di anggap kegiatan ini memberikan dampak timbulnya korupsi. Di Kazaktan sama halnya dengan di Korea Selatan, penekanan implementasi *e-government* adalah pada kegiatan pengadaan



# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

barang dan jasa publik, selain itu penekanan juga dilakukan pada proses perijinan dan layanan kegiatan kepolisian untuk mengurangi adanya penyuapan terhadap petugas publik.

Di Cina, implementasi *e-government* melalui 4 aspek yaitu penyediaan informasi yang transparan, pengawasan melalui partisipasi publik, sistem peringatan dini yang berfungsi memberikan peringatan jika terjadi penyimpangan dan pembagian informasi kepada public baik informasi yang bersifat vertical dan horizontal yang dapat mencegah korupsi.

## Rekomendasi

Berbagai implementasi e government di berbagai Negara dapat dijadikan contoh untuk penyempurnaan e government di Indonesia.

## REFERENSI

- Asian Development Bank. 2019. Kemiskinan di Indonesia. <https://www.adb.org/id/indonesia/poverty>
- Buehn, A., Dell'Anno, R. and Schneider, F., 2017. Exploring the dark side of tax policy: an analysis of the interactions between fiscal illusion and the shadow economy. *Empirical Economics*, 54(4), pp. 1609-1630
- Fauzia Mutia, 2019. Maret 2019, Penduduk Miskin Indonesia Turun Jadi 25,14 Juta Orang, <https://money.kompas.com/read/2019/07/15/135853726/maret-2019-penduduk-miskin-indonesia-turun-jadi-2514-juta-orang>
- KPK. 2019. Dampak Korupsi terhadap Ekonomi. <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>
- Lee Eunhee , 2017. The Impact of E-government

on Corruption Control. [http://martin.uky.edu/sites/martin.uky.edu/files/Capstone\\_Projects/Capstones\\_2017/Lee.pdf](http://martin.uky.edu/sites/martin.uky.edu/files/Capstone_Projects/Capstones_2017/Lee.pdf)

- Park, H. and Blenkinsopp, J., 2011. The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), pp. 254-274
- Pitoko Ridwan Aji , 2019. Tahun 2019, Pemerintah Bidik Penurunan Angka Kemiskinan <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/16/181437526/tahun-2019-pemerintah-bidik-penurunan-angka-kemiskinan>.
- Sheryazdanova Gulmira Rustemovna Sheryazdanova, Ainur Kanapiyanovna Abdina, Horlan Saduakasovna Abdildina, Margarita Kabdulayevna Kakimzhanova\* , Torgyn Meyrhanovna Sadykova and Aiman Galimjanovna Gappasova. 2016. Development of Electronic Government in Kazakhstan as a Tool to Combat Corruption. *Indian Journal of Science and Technology*, Vol 9(5)
- United Nation. 2018. E government Survey. [https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018\\_FINAL%20for%20web.pdf](https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf)
- Zhang Wei Jie , Yu Ming Zhang, Bo Wang. 2011. E-government Application in Combating Corruption: China's Case, <https://www.semanticscholar.org/paper/E-government-Application-in-Combating-Corruption%3A-Zhang-Zhang/499b06cdfcea32cbcfee97055cf6d7861b71a383>